

PENGARUH PENDAPATAN ASLI DAERAH, DANA ALOKASI UMUM, DANA BAGI HASIL, DAN JUMLAH PENDUDUK TERHADAP TINGKAT KEMISKINAN DENGAN BELANJA DAERAH SEBAGAI VARIABEL INTERVENING PADA KABUPATEN/ KOTA DI PROVINSI RIAU TAHUN 2011 S.D 2015

Riry Isramiwarti, M. Rasuli & Taufeni Taufik
Magister Manajemen FEB Universitas Riau
Email: riryisramiwarti@yahoo.co.id

ABSTRACT

The purpose of this research is to know the influence of Local Revenue (PAD), General Allocation Fund (DAU), DBH and Total Population to Poverty Level through Regional Expenditure at Regency / City in Riau Province Year 2011-2015. The study was conducted for 2 months, from October to December 2016. The object of this study is the district / city in Riau Province, the population and sample used in this study are 12 districts / municipalities in Riau Province. The data used are secondary data obtained based on documentation of result from publication of BPS (Central Bureau of Statistics) for data of Economic Growth and Poverty Rate while data of Pendapatan Asli Daerah (PAD), General Allocation Fund (DAU), DBH and Capital Expenditure Obtained from the Financial Management Agency and Regional Asset (BPKAD) Riau Province. The analysis tool used is Path Analysis using Partial Least Square (PLS) method. The result of the research shows that Pendapatan Asli Daerah (PAD), Profit Sharing Fund (DBH) and Total Population (JP) have a significant influence to the decreasing of Poverty Level through Regional Expenditure (BD). While the General Allocation Fund (DAU) does not have a significant effect on the decrease of the number of Poverty Rate through Regional Expenditure (BD). Regional Expenditure (BD) as an intervening variable has an important role in increasing the influence of Pendapatan Asli Daerah (PAD) and the Population (JP) in reducing Poverty, but has little role in increasing the effect of General Allocation Fund (DAU) and Revenue Sharing Fund (DBH) to reduce Poverty Rate.

Keywords : Pendapatan asli daerah, general allocation fund, DBH, population, and regional expenditure

LATAR BELAKANG PENELITIAN

Masalah kemiskinan di Indonesia merupakan isu penting dan perlu perhatian khusus dalam mengatasinya. Kemiskinan adalah sebuah kondisi ketidakmampuan seseorang dalam memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian, tempat berlindung, dan kesehatan (Adit, 2010). Sejak diberlakukannya otonomi daerah pada tahun 1999, salah satu tujuannya adalah untuk menurunkan jumlah angka kemiskinan di Indonesia, namun hingga saat ini sudah berjalan lebih dari 11 tahun, masih belum memberikan hasil yang begitu memuaskan. Angka kemiskinan Indonesia masih tergolong tinggi. Hal ini menjadikan permasalahan kemiskinan dan upaya untuk menurunkannya masih terus dilakukan. Permasalahan kemiskinan, terjadi di setiap daerah di Indonesia, termasuk di 12 daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Riau. Wilayah Kabupaten Kepulauan Meranti memiliki angka kemiskinan yang paling tinggi di

Provinsi Riau jumlah penduduk miskinnya selama lima tahun terakhir rata-rata berjumlah 64,36 ribu jiwa atau 35,61%.

Masalah kemiskinan tak terlepas dari masalah kemampuan penduduk dalam memenuhi kebutuhan pokoknya. Terdapat beberapa variabel yang berpengaruh terhadap kemiskinan yang bersumber dari variabel mikro ekonomi maupun makro ekonomi. Satu hal yang menjadi titik awal penelitian ini adalah bahwa pemerintah baik pusat maupun daerah merupakan pihak yang memiliki otoritas untuk menjaga faktor mikro ekonomi maupun makro ekonomi menjadi kondusif. Intervensi pemerintah dalam menjaga stabilitas harga pangan maupun meningkatkan jumlah lapangan kerja menjadi hal yang penting untuk dilakukan (Jolianis, 2016). Kebijakan pemerintah, baik pusat maupun daerah yang berorientasi pada program pengentasan kemiskinan sudah seharusnya didasarkan pada faktor-faktor yang mempengaruhi kondisi kemiskinan. Faktor-faktor penyebab kemiskinan dapat berupa karakteristik makro, sektor, komunitas, rumah tangga, dan individu (*World Bank*, 2007).

Melalui kebijakan publik yang diimplementasikan kedalam kebijakan fiskal baik ditingkat pusat maupun daerah ditargetkan dapat menyelesaikan masalah pembangunan (kemiskinan, pengangguran dan distribusi pendapatan) disinilah APBN atau APBD diperlukan sebagai sumber pembiayaan (Faisal Nur, 2015). Ditingkat daerah kebijakan publik yang diimplementasikan kedalam kebijakan fiskal tercermin dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) mencakup pendapatan dan pengeluaran pemerintah daerah dapat digunakan sebagai cerminan kebijakan yang diambil oleh pemerintah daerah. Struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) mencakup dua bagian penting yaitu anggaran pendapatan daerah dan anggaran belanja daerah. Belanja daerah merupakan pengalokasian dana yang harus dilakukan secara efektif dan efisien, karena tolok ukur keberhasilan pelaksanaan kewenangan daerah ditentukan oleh belanja daerah.

Untuk meningkatkan produktivitas perekonomian di suatu daerah, peningkatan alokasi belanja daerahnya terhadap belanja modal dalam bentuk aset tetap seperti infrastruktur dan peralatan sangat penting dan perlu ditingkatkan karena semakin tinggi belanja daerah yang dialokasikan terhadap belanja modal akan semakin tinggi pula produktivitas perekonomiannya. Saragih (2008), menyatakan bahwa pemanfaatan belanja daerah hendaknya dialokasikan untuk hal-hal yang produktif seperti untuk melakukan aktivitas pembangunan, penerimaan pemerintah hendaknya lebih banyak untuk program-program pelayanan publik. Selain itu, kondisi perekonomian secara keseluruhan di setiap daerah juga dapat dilihat dari seberapa besar jumlah Belanja Daerah pada daerah bersangkutan. Pengeluaran pemerintah atau Belanja Daerah merupakan bentuk rangsangan yang dilakukan oleh pemerintah terhadap perekonomian daerah. Semakin besar nilai Belanja Daerah yang dialokasikan untuk pembangunan, maka akan meningkatkan kesejahteraan penduduk dan menurunkan tingkat kemiskinan di daerah itu sendiri (Nopirin, 2011).

Pada 12 daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Riau tingkat kemiskinannya masih menunjukkan angka yang tinggi dan ketergantungan pada dana transfer (DAU, DBH dan DAK) dari pusat terhadap Belanja Daerahnya juga cukup tinggi padahal Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Riau rata-rata memiliki sumber kekayaan alam yang besar yang seharusnya dapat dioptimalkan sebagai sumber pembiayaan melalui PAD untuk Belanja Daerah terutama dalam pembiayaan pembangunan yang bertujuan untuk mensejahterakan rakyat.

Berdasarkan pengamatan awal ditemukan bahwa Pertumbuhan Ekonomi pada 12 daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Riau dengan indikator PDRB-nya mengalami

penurunan bahkan minus yang berbanding terbalik dengan PAD, DAU, DBH dan Belanja Modal yang justru mengalami peningkatan serta persentase jumlah penduduk miskinnya yang juga cenderung meningkat sehingga menjadi menarik untuk diteliti bagaimana sebenarnya dan seberapa besar pengaruh dari keempat variabel tersebut (PAD, DAU, DBH dan Belanja Modal) dapat mempengaruhi Pertumbuhan Ekonomi dan Tingkat Kemiskinan pada 12 daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Riau.

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: Apakah Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Bagi Hasil (DBH), dan Jumlah Penduduk berpengaruh terhadap Tingkat Kemiskinan dengan Belanja Daerah sebagai variabel intervening pada Kabupaten/Kota di Provinsi Riau Tahun 2011-2015. Serta apakah Belanja Daerah berpengaruh terhadap Tingkat Kemiskinan pada Kabupaten/Kota di Provinsi Riau Tahun 2011-2015.

KAJIAN PUSTAKA

Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Tingkat Kemiskinan dengan Belanja Daerah sebagai Variabel Intervening

Secara konseptual, perubahan pendapatan akan berpengaruh terhadap belanja atau pengeluaran, namun tidak selalu seluruh tambahan pendapatan tersebut akan dialokasikan dalam belanja. Abdullah & Halim (2008), menemukan bahwa sumber pendapatan daerah berupa PAD dan dana perimbangan berpengaruh terhadap belanja daerah secara keseluruhan. Meskipun proporsi PAD maksimal hanya sebesar 10% dari total pendapatan daerah, kontribusinya terhadap pengalokasian anggaran cukup besar, terutama bila dikaitkan dengan kepentingan politis. PAD suatu daerah umumnya mencerminkan kemakmuran (wealth) dari pemerintah daerah ataupun propinsi. Peningkatan PAD merupakan salah satu sumber pendanaan daerah untuk dengan peningkatan kualitas layanan publik (Adi, 2006). Kualitas layanan publik yang baik akan mencerminkan kinerja suatu pemerintah daerah untuk meningkatkan nilai PAD, akan berdampak pada peningkatan kemakmuran penduduk.

Peningkatan PAD akan mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. Adanya kenaikan PAD akan memicu dan memacu pertumbuhan ekonomi daerah menjadi lebih baik daripada pertumbuhan ekonomi daerah sebelumnya. Kenaikan PAD juga dapat mengoptimalkan dan meningkatkan aktivitas pada sektor-sektor yang terkait dengan pertumbuhan ekonomi, seperti sektor industri dan perdagangan, sektor jasa, dan sektor-sektor lainnya. Semakin besar Pendapatan Asli Daerah suatu daerah maka semakin besar pula alokasi Belanja Daerahnya (Ardhani dalam Wandira, 2013). Hal serupa juga diungkapkan oleh Brata (2008), bahwa peningkatan PAD diharapkan meningkatkan belanja daerah terutama untuk investasi belanja modal pemerintah daerah sehingga kualitas pelayanan publik semakin baik.

Menurut McCulloch dan Sirait (2009), salah satu kunci yang harus diperhatikan dalam desentralisasi adalah bahwa pemerintah daerah harus lebih responsif terhadap kebutuhan penduduknya. Pada banyak negara berkembang termasuk Indonesia, tingkat kemiskinannya masih relatif tinggi dan oleh karenanya desentralisasi diharapkan akan menciptakan kebijakan-kebijakan yang lebih responsif terhadap kebutuhan penduduk miskin.

Penelitian yang dilakukan oleh Tri Hartitik (2014), menyimpulkan bahwa Pendapatan Asli Daerah memiliki pengaruh signifikansi terhadap belanja Daerah. Dengan meningkatnya Pendapatan Asli Daerah, daerah lebih leluasa dalam merencanakan dan mengalokasikan kegiatan atau pengeluaran yang akan

berdampak terhadap peningkatan pembangunan daerah terutama pembangunan infrastruktur. Pendapatan Asli Daerah yang tinggi akan mempengaruhi pembangunan dan perkembangan di daerah yang direalisasikan dalam bentuk pengadaan fasilitas, infrastruktur, dan sarana prasarana yang ditujukan untuk kepentingan publik sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan dan pelayanan kepada masyarakat, yang pada akhirnya dapat menanggulangi kemiskinan di daerah. Berdasarkan pemaparan diatas maka hipotesis pertama yang dapat dikembangkan dalam penelitian ini adalah:

H1: Pendapatan Asli Daerah (PAD) berpengaruh terhadap Tingkat Kemiskinan dengan Belanja Daerah sebagai variabel intervening.

Pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU) terhadap Tingkat Kemiskinan dengan Belanja Daerah sebagai Variabel Intervening

Dana Alokasi Umum (DAU) adalah dana yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan daerah untuk membiayai kebutuhan pengeluarannya dalam rangka pelaksanaan desentralisasi". Dana Alokasi Umum (DAU) memiliki jumlah yang sangat signifikan sehingga semua pemerintah daerah menjadikannya sebagai sumber penerimaan terpenting dalam anggaran penerimaannya dalam APBD. Tujuan Dana Alokasi Umum (DAU) adalah untuk mengatasi ketimpangan fiskal keuangan antara pemerintah pusat dan ketimpangan horizontal antar pemerintah daerah karena ketidakmerataan sumber daya yang ada pada masing-masing daerah.

Menurut Undang-Undang No. 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Dana Alokasi Umum (DAU) adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. DAU berperan dalam pemerataan horizontal (horizontal equalization), yaitu dengan menutup celah fiskal (fiscal gap) yang berada diantara kebutuhan fiskal dan potensi ekonomi yang dimiliki daerah. DAU diberikan pemerintah pusat untuk membiayai kekurangan dari pemerintah daerah dalam memanfaatkan PAD. DAU bersifat "Block Grant" yang berarti penggunaannya diserahkan kepada daerah sesuai dengan prioritas dan kebutuhan daerah untuk peningkatan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah.

Penelitian yang dilakukan oleh Andri Devita, Arman Delis dan Junaidi (2014), tentang Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum dan Jumlah Penduduk Terhadap Belanja Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi menyimpulkan bahwa DAU secara simultan dan parsial dapat meningkatkan belanja langsung dan belanja tidak langsung pada belanja daerah. World Bank (2007), menjelaskan karakteristik penduduk miskin menurut komunitas, wilayah, rumah tangga, dan individu. Pada faktor komunitas, infrastruktur merupakan determinan utama kemiskinan. Keadaan infrastruktur sangat erat kaitannya dengan tingkat kesejahteraan masyarakat. Infrastruktur yang baik akan memudahkan masyarakat untuk melakukan aktivitas ekonomi maupun sosial kemasyarakatan, selain itu memudahkan investor untuk melakukan investasi di daerah yang bersangkutan. Indikator pembangunan infrastruktur yang penting adalah saluran irigasi, akses listrik, dan kondisi jalan utama transportasi. Indikator lain dari karakteristik faktor komunitas adalah akses yang sama terhadap usaha atau pekerjaan seperti keberadaan lembaga keuangan dan industri.

Menurut Simanullang (2013), penggunaan Dana Alokasi Umum (DAU) dan penerimaan umum lainnya dalam APBD harus tetap pada kerangka pencapaian

tujuan pemberian otonomi kepada daerah yaitu peningkatan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat agar semakin baik. Berdasarkan pemaparan diatas maka hipotesis kedua yang dapat dikembangkan dalam penelitian ini adalah:

H2: Dana Alokasi Umum (DAU) berpengaruh terhadap Tingkat Kemiskinan dengan Belanja Daerah sebagai variabel intervening.

Pengaruh Dana Bagi Hasil (DBH) terhadap Tingkat Kemiskinan dengan Belanja Daerah sebagai Variabel Intervening

Dana Bagi Hasil (DBH) adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah dengan memperhatikan potensi daerah penghasil berdasarkan angka persentase tertentu untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Dana Bagi Hasil (DBH) merupakan hak daerah atas pengelolaan sumber-sumber penerimaan negara yang dihasilkan dari masing-masing daerah, yang besarnya ditentukan atas daerah penghasil (by origin) yang didasarkan atas ketentuan perundangan yang berlaku. Secara garis besar DBH terdiri dari DBH perpajakan, dan DBH sumber daya alam (SDA). Dana bagi hasil merupakan sumber pendapatan daerah yang cukup potensial dan merupakan salah satu moda dari pemerintah daerah dalam mendapatkan dana pembangunan dalam memenuhi belanja daerah yang bukan berasal dari pendapatan asli daerah selain dana alokasi umum dan dana alokasi khusus.

Peningkatan pendapatan daerah melalui DBH dan sumber-sumber lainnya sebenarnya merupakan akses dari pertumbuhan ekonomi. Daerah yang pertumbuhan ekonominya positif mempunyai kemungkinan mendapatkan kenaikan pendapatan daerah. Wahyuni dan Priyo (2009), menyebutkan bahwa Dana Bagi Hasil (DBH) merupakan sumber pendapatan daerah yang cukup potensial dan merupakan salah satu modal dasar pemerintah daerah dalam mendapatkan dana pembangunan dan memenuhi belanja daerah selain yang berasal dari Pendapatan Asli Daerah (PAD),

Besaran Dana Bagi Hasil (DBH) yang dialokasikan pada anggaran belanja daerah yang efektif dapat memacu pertumbuhan ekonomi melalui kebijakan fiskal yang selanjutnya akan menciptakan pembangunan ekonomi yang lebih tinggi. Pengalokasian Dana Bagi Hasil (DBH) kepada daerah-daerah di Indonesia dengan tujuan untuk pemerataan kemampuan keuangan antar daerah. Hal ini bertujuan untuk mengurangi ketimpangan keuangan antar daerah. Diharapkan dengan pengalokasian Dana Bagi Hasil (DBH) akan mendorong pertumbuhan ekonomi di setiap daerah. Pertumbuhan ekonomi akan berdampak pada distribusi pendapatan yang berefek pada pengentasan kemiskinan. Berdasarkan pemaparan diatas maka hipotesis ketiga yang dapat dikembangkan dalam penelitian ini adalah:

H3 : Dana Bagi Hasil (DBH) berpengaruh terhadap Tingkat Kemiskinan dengan Belanja Daerah sebagai variabel intervening.

Pengaruh Jumlah Penduduk terhadap Tingkat Kemiskinan dengan Belanja Daerah sebagai Variabel Intervening

Jumlah penduduk yang besar bagi pemerintah walaupun oleh para perencana pembangunan dipandang sebagai asset atau modal dasar pembangunan tetapi sekaligus juga sebagai beban pembangunan. Sebagai asset apabila dapat meningkatkan kualitas maupun keahlian atau ketrampilannya sehingga akan meningkatkan produksi nasional. Jumlah penduduk yang besar akan menjadi beban jika struktur belanja daerah yang dialokasikan untuk belanja langsung yang bersifat produktif juga rendah, serta persebaran dan mutunya sedemikian rupa hanya menuntut pelayanan sosial dan tingkat produksinya rendah sehingga menjadi tanggungan penduduk yang bekerja secara efektif (Mardiasmo, 2007).

Menurut penelitian Irdha, Vecky dan Daisy (2012), pengeluaran belanja daerah dilihat dari perkembangan jumlah penduduk di suatu daerah, apabila perkembangan jumlah penduduk semakin besar akan memerlukan anggaran yang semakin besar pula. Meningkatnya jumlah penduduk menuntut konsekuensi logis akan adanya peningkatan sarana dan prasarana umum, baik dari aspek kuantitas maupun kualitas. Perkembangan jumlah penduduk yang semakin besar akan memerlukan anggaran yang semakin besar, supaya kualitas pertumbuhan ekonomi lebih baik. Berdasarkan pemaparan diatas maka hipotesis keempat yang dapat dikembangkan dalam penelitian ini adalah:

H4: Jumlah Penduduk berpengaruh terhadap Tingkat Kemiskinan dengan Belanja Daerah sebagai variabel intervening.

Pengaruh Belanja Daerah terhadap Tingkat Kemiskinan

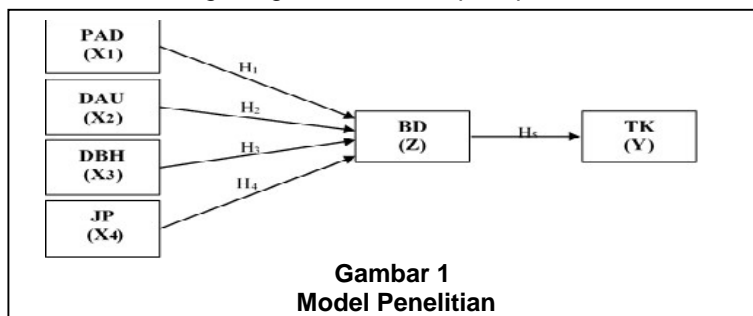
Belanja Daerah menurut PP No. 58 Tahun 2005 adalah semua pengeluaran dari rekening kas umum yang mengurangi ekuitas dana lancar, yang merupakan kewajiban Daerah dalam satu tahun anggaran yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh Daerah. Sesuai aturan APBD dan tujuan otonomi daerah, bahwa hakikat Anggaran Daerah adalah merupakan alat untuk meningkatkan pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat, maka APBD harus benar-benar menggambarkan kerangka perangkaan ekonomis yang mencerminkan kebutuhan masyarakat untuk memecahkan masalahnya dan meningkatkan kesejahteraan (Mardiasmo, 2007).

Pertumbuhan Ekonomi merupakan salah satu indikator dari keberhasilan pembangunan ekonomi suatu daerah. Dimana pembanguana yang dilakukan pemerintah daerah dapat tepat sasaran maka Pertumbuhan ekonomi akan mengalami peningkatan. Bila pertumbuhan ekonomi daerah meningkat maka tingkat kesejahteraan masyarakat dan juga produktifitasnya pun semakin tinggi. Sehingga pengangguran berkurang dan kemiskinan pun akan turun.

Penelitian yang dilakukan oleh Meilen, Amran dan Patrick (2014), menunjukkan bahwa Belanja Langsung memiliki pengaruh terhadap Kemiskinan di Kota Manado. Kemudian hasil lain dari penelitian Agustina (2013), menunjukkan bahwa Belanja publik berpengaruh positif terhadap Tingkat kemiskinan di Provinsi Jawa Timur. Berdasarkan pemaparan diatas maka hipotesis kelima yang dapat dikembangkan dalam penelitian ini adalah:

H5: Belanja Daerah berpengaruh terhadap Tingkat Kemiskinan.

Dari pengaruh antar variabel tersebut dapat digambarkan kedalam suatu kerangka berpikir dalam suatu bentuk model penelitian yang digunakan untuk menjelaskan pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Bagi Hasil dan Jumlah Penduduk terhadap Tingkat Kemiskinan dengan Belanja Daerah sebagai variabel *intervening* dengan skematis seperti pada Gambar 1.



METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif kuantitatif yang bertujuan untuk menjelaskan suatu fenomena empiris yang disertai data statistik, karakteristik dan pola hubungan antar variabel. Penelitian ini dilaksanakan pada 12 Kabupaten/Kota di Provinsi Riau. Objek penelitian ini pada daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Riau, maka populasi dan sampel dalam penelitian ini adalah 12 daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Riau.

Data yang digunakan adalah data sekunder berupa data historis yang diambil selama kurun waktu tahun 2011-2015. Data-data tersebut berupa data laporan realisasi APBD, yang diperoleh melalui dokumen publikasi laporan realisasi APBD atau laporan perhitungan APBD daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Riau. Sedangkan data pertumbuhan jumlah penduduk dan Tingkat Kemiskinan diperoleh dari Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Riau melalui publikasi Statistik Keuangan Provinsi Riau tahun 2011 s/d 2015. Metode analisa yang digunakan adalah *Partial Least Square* (PLS) dengan alat analisis Warp-PLS.

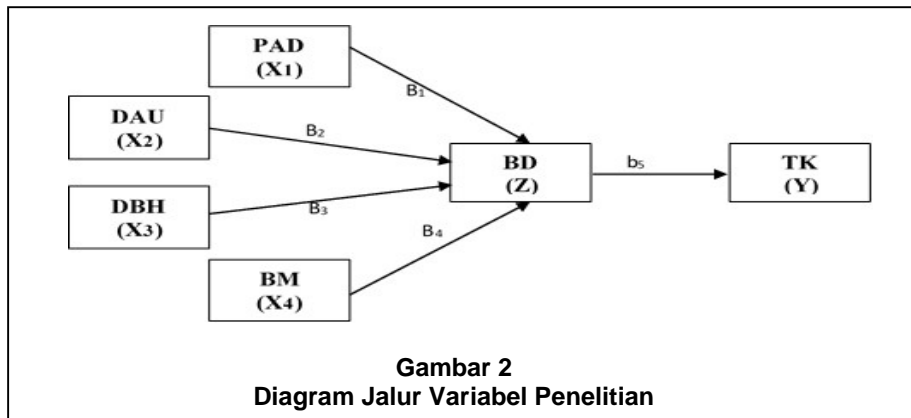
Langkah-langkah analisis persamaan struktural *Partial Least Square* (PLS) dengan menggunakan Warp-PLS dapat dilihat pada uraian berikut (Ghozali, 2009), yaitu:

a. Merancang Model Struktural (*Inner Model*)

Perancangan Model Struktural hubungan antar variabel laten didasarkan pada rumusan masalah atau hipotesis penelitian, yaitu: Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Bagi Hasil dan Jumlah Penduduk terhadap Tingkat Kemiskinan melalui Belanja Daerah pada Kabupaten/Kota di Provinsi Riau Tahun 2011-2015. Model tersebut juga dapat dinyatakan dalam bentuk persamaan sebagai berikut:

$$Y = 1X_1 + 2X_2 + 3X_3 + 4X_4 + Z_1$$

Model tersebut dikembangkan untuk menjawab permasalahan penelitian serta berbasis teori dan konsep, yang dapat diilustrasikan seperti Gambar 2.



b. Pemeriksaan terhadap asumsi (*Outer Model*)

Langkah kedua dari analisis persamaan struktural *Partial Least Square* (PLS) adalah pemeriksaan terhadap asumsi yang melandasi. *Outer Model* atau Model Pengukuran mendefinisikan bagaimana setiap blok indikator berhubungan dengan variabel latennya. Perancangan Model Pengukuran menentukan sifat indikator dari masing-masing variabel laten, apakah refleksif atau formatif, berdasarkan definisi operasional variabel.

c. Pendugaan parameter

Langkah ketiga di dalam analisis persamaan struktural *Partial Least Square* (PLS) adalah pendugaan parameter atau koefisien *path*. Perhitungan koefisien pada gambar diagram persamaan struktural *Partial Least Square* (PLS) pada uraian sebelumnya dijelaskan bahwa:

1. Untuk anak panah satu arah digunakan perhitungan regresi variabel yang distandarkan, secara parsial pada tiap-tiap persamaan. Metode yang digunakan adalah *Ordinary Least Square (OLS)*, yaitu metode kuadrat terkecil biasa. Hal ini dapat dilakukan mengingat modelnya rekursif (satu arah). Dari perhitungan ini diperoleh koefisien *path* pengaruh langsung.
2. Evaluasi *Goodness of Fit*

Goodness of Fit Model diukur menggunakan R^2 variabel laten dependen dengan interpretasi yang sama dengan regresi. Q^2 *predictive relevance* untuk model struktural mengukur seberapa baik nilai observasi dihasilkan oleh model dan juga estimasi parameternya dengan rumus sebagai berikut: $Q^2 = 1 - (1 - R1^2)(1 - R2^2)$. Besaran memiliki nilai dengan rentang 0 – 2 pada analisis persamaan struktural *Partial Least Square* (PLS).

Langkah terakhir di dalam analisis persamaan struktural *Partial Least Square* (PLS) adalah melakukan *interpretasi* hasil analisis yaitu menentukan jalur pengaruh yang signifikan dan mengidentifikasi jalur yang pengaruhnya lebih kuat yaitu dengan membandingkan besarnya koefisien jalur yang terstandar.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pengujian Hipotesis Penelitian

Pengujian hipotesis penelitian dimaksudkan untuk menguji pengaruh langsung dan tidak langsung variabel Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Bagi Hasil (DBH) dan Jumlah Penduduk (JP) terhadap variabel Tingkat Kemiskinan melalui variabel Belanja Daerah (BD). Secara prosedural dilakukan dua tahapan, dimana tahapan pertama akan menghasilkan sebuah Persamaan tanpa adanya peran dari variabel *intervening* yaitu Belanja Daerah (BD), dan tahapan kedua menghasilkan sebuah persamaan dengan adanya peran dari variabel *intervening*.

Akan tetapi jika dilihat dari model penelitian dan dari hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini maka pengujian konstruk tahap pertama tidak ditampilkan yaitu adanya pengaruh langsung dari variabel Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Bagi Hasil (DBH), dan Jumlah Penduduk (JP) terhadap variabel Tingkat Kemiskinan, sehingga pembahasan pengujian hipotesis langsung pada pembahasan pengujian konstruk tahap kedua.

Pengujian hipotesis tahap kedua akan menghasilkan sebuah persamaan dengan adanya peran dari variabel *intervening* yaitu Belanja Daerah (BD) terhadap variabel dependen yaitu Tingkat Kemiskinan (TK). Pengujian konstruk tahap kedua akan menggambarkan secara tidak langsung bagaimana pengaruh variabel Pendapatan Asli Daerah (PAD) = X1, Dana Alokasi Umum (DAU) = X2, Dana Bagi Hasil (DBH) = X3, dan Jumlah Penduduk (JP) = X4 terhadap Tingkat Kemiskinan (TK) = Y melalui Belanja Daerah (BD) = Z.

Signifikansi parameter yang diestimasi memberikan informasi yang sangat berguna mengenai hubungan antara variabel-variabel penelitian. Dasar yang digunakan dalam menguji hipotesis adalah nilai yang terdapat pada *output path coefficients* seperti terlihat dalam tabel berikut.

Tabel 1
Hasil Pengujian Konstruk Tahap Kedua

No	Variabel	Path Koefisien	p-Value	Standard Error
1	PAD (X1) -> BD (Z) -> TK (Y)	0.218	<0.001	0.055
2	DAU (X2) -> BD (Z) -> TK (Y)	0.099	0.092	0.073
3	DBH (X3) -> BD (Z) -> TK (Y)	0.658	<0.001	0.089
4	JP (X4) -> BD (Z) -> TK (Y)	-0.154	0.197	0.719
5	BD (Z) -> TK (Y)	-0.346	<0.001	0.094

Sumber : Lampiran 2, Olahan Data Penelitian Warp-PLS: 5.0, 2017

Berdasarkan tabel 1 di atas, diketahui *path coefficients* masing-masing variabel yang dapat dimasukkan dalam persamaan model kedua sebagai berikut :

$$Y = 0.218X1 + 0.099X2 + 0.658X3 - 0.154X4 - 0.346Z$$

Nilai *path* koefisien masing-masing variabel tersebut dapat diartikan sebagai berikut:

1. Nilai *path* koefisien variabel PAD sebesar 0,218 mempunyai arti apabila setiap ada kenaikan nilai PAD melalui Belanja Daerah sebesar 1 satuan maka akan berpengaruh positif terhadap Tingkat Kemiskinan sebesar 0,218 satuan.
2. Nilai *path* koefisien variabel DAU sebesar 0,099 mempunyai arti apabila setiap ada kenaikan DAU melalui Belanja Daerah sebesar 1 satuan maka akan berpengaruh positif terhadap Tingkat Kemiskinan sebesar 0,099 satuan
3. Nilai *path* koefisien variabel DBH sebesar 0,658 mempunyai arti apabila setiap ada kenaikan DBH melalui Belanja Daerah sebesar 1 satuan maka akan berpengaruh positif terhadap Tingkat Kemiskinan sebesar 0,658 satuan.
4. Nilai *path* koefisien variabel Jumlah Penduduk sebesar -0,154 mempunyai arti apabila setiap ada kenaikan Jumlah Penduduk melalui Belanja Daerah sebesar 1 satuan maka akan berpengaruh negatif terhadap Tingkat Kemiskinan sebesar -0,154 satuan.
5. Nilai *path* koefisien variabel Belanja Daerah sebesar -0,346 mempunyai arti apabila setiap ada kenaikan Belanja Daerah sebesar 1 satuan maka akan berpengaruh negatif terhadap Tingkat Kemiskinan sebesar -0,346 satuan.

Kemudian pengaruh secara parsial antara variabel independen melalui variabel mediasi terhadap variabel dependen secara tidak langsung seperti yang terangkum dalam tabel 2 tersebut dapat diketahui tingkat signifikansinya, yaitu dengan membandingkan hasil nilai p-Value dengan nilai α , dimana nilai probabilitas $\alpha = 5\%$ atau $\alpha = 0,05$. Syarat pengambilan keputusannya adalah:

1. Jika nilai p-Value < 0,05 maka H_0 diterima dan H_a ditolak.
 H_0 diterima berarti terdapat pengaruh yang signifikan secara parsial antara variabel *independen* terhadap variabel *dependen* melalui variabel mediasi.
2. Jika nilai p-Value > 0,05 maka H_0 ditolak dan H_a diterima. H_0 ditolak berarti tidak terdapat pengaruh yang signifikan secara parsial antara Variabel *independen* terhadap variabel *dependen* melalui variabel mediasi.

Dari hasil pengolahan data dengan program Warp-PLS versi 5.0 untuk tahap kedua yang dirangkum dalam tabel 2 diatas, maka dapat dilakukan uji hipotesis secara parsial pada tahap kedua yaitu menguji pengaruh tidak langsung variabel Pendapatan Asli Daerah (PAD) = X1, Dana Alokasi Umum (DAU) = X2, Dana Bagi Hasil (DBH) = X3, dan Jumlah Penduduk = X4 terhadap Tingkat Kemiskinan (TK) = Y melalui Belanja Daerah (BD) = Z. Hipotesis penelitian yang akan diuji akan dijabarkan sebagai berikut.

Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Tingkat Kemiskinan melalui Belanja Daerah

Berdasarkan tabel 1 di atas, diketahui bahwa pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Tingkat Kemiskinan (TK) melalui Belanja Daerah (BD) adalah signifikan, hal ini dibuktikan dari nilai *path* koefisien sebesar 0.218 dengan nilai p-Value sebesar <0.001 yang berarti p-Value $< 0,05$ dan standar error sebesar 0.055. Hasil ini menunjukkan bahwa ada pengaruh antara Pendapatan Asli Daerah terhadap Tingkat Kemiskinan melalui Belanja Daerah. Dengan demikian, pengaruh X1 terhadap Y melalui Z dalam penelitian ini hipotesis pertama yang menyatakan bahwa "Pendapatan Asli Daerah (PAD) berpengaruh terhadap Tingkat Kemiskinan melalui Belanja Daerah" diterima, berarti terdapat pengaruh yang signifikan secara parsial antara variabel independen terhadap variabel dependen melalui variabel mediasi atau secara parsial yakni Pendapatan Asli Daerah memiliki pengaruh yang signifikan terhadap Tingkat Kemiskinan melalui Belanja Daerah.

Semakin besar Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang dimiliki dan dialokasikan oleh pemerintah daerah melalui Belanja Daerahnya pada 12 Kabupaten/Kota di Provinsi Riau untuk program pembangunan yang mengarah pada kesejahteraan rakyat akan menurunkan tingkat kemiskinan. Ini sejalan dengan pendapat Sidik (2008), bahwa pemerintah daerah diharapkan mampu menggali sumber-sumber keuangan lokal, khususnya melalui Pendapatan Asli Daerah yang akan digunakan untuk sumber pembiayaan daerah. Daerah yang memiliki tingkat pertumbuhan PAD yang positif mempunyai kemungkinan untuk memiliki tingkat pertumbuhan ekonomi yang lebih baik, jika PAD meningkat maka dana yang dimiliki oleh pemerintah daerah akan lebih banyak dan tingkat kemandirian daerah akan meningkat pula, oleh sebab itu pemerintah daerah harus berinisiatif untuk lebih menggali potensi-potensi daerah dan dialokasikan dalam Belanja Daerahnya demi meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerahnya melalui PAD. Adanya pertumbuhan PAD secara berkelanjutan akan menyebabkan peningkatan pertumbuhan ekonomi bagi daerah tersebut (Tambunan, 2009). Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan sumber penerimaan yang vital bagi pelaksanaan pembiayaan pemerintahan daerah. Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah pendapatan yang diperoleh daerah, yang dipungut berdasarkan Peraturan Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Bila Pendapatan Asli Daerah (PAD) diupayakan menjadi tinggi, menunjukkan adanya pertumbuhan ekonomi di daerah sehingga hal ini dapat menekan tingkat kemiskinan.

Adanya peningkatan PAD yang dialokasikan dalam Belanja Daerah terutama dalam bentuk Belanja Langsung atau Belanja Modal akan mendorong pertumbuhan ekonomi daerah, hal ini sebagai fungsi utama PAD adalah untuk membiayai pembangunan daerah. Sehingga dengan kenaikan PAD akan memicu dan memacu pertumbuhan ekonomi daerah menjadi lebih baik daripada pertumbuhan ekonomi daerah sebelumnya. Kenaikan PAD juga dapat mengoptimalkan dan meningkatkan aktivitas pada sektor-sektor yang terkait dengan pertumbuhan ekonomi, seperti sektor industri dan perdagangan, sektor jasa, dan sektor-sektor lainnya. Semakin besar Pendapatan Asli Daerah suatu daerah maka semakin besar pula alokasi Belanja Daerahnya. Dengan peningkatan PAD diharapkan meningkatkan Belanja Daerah terutama untuk investasi Belanja Modal Pemerintah Daerah sehingga kualitas pelayanan publik semakin baik. Kualitas layanan publik yang baik akan mencerminkan kinerja suatu pemerintah daerah dalam meningkatkan nilai PAD, yang pada akhirnya akan berdampak pada peningkatan kemakmuran penduduk dan dapat menurunkan tingkat kemiskinan.

Hasil ini didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh Tri Hartitik (2014), yang menyimpulkan bahwa dengan meningkatnya Pendapatan Asli Daerah, daerah lebih leluasa dalam merencanakan dan mengalokasikan kegiatan atau pengeluaran yang akan berdampak terhadap peningkatan pembangunan daerah terutama pembangunan infrastruktur. Pendapatan Asli Daerah yang tinggi akan mempengaruhi pembangunan dan perkembangan di daerah yang direalisasikan dalam bentuk pengadaan fasilitas, infrastruktur, dan sarana prasarana yang ditujukan untuk kepentingan publik sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan dan pelayanan kepada masyarakat, yang pada akhirnya dapat menanggulangi kemiskinan di daerah.

Pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU) terhadap Tingkat Kemiskinan melalui Belanja Daerah

Berdasarkan tabel 2 diatas, diketahui bahwa pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU) terhadap Tingkat Kemiskinan (TK) melalui Belanja Daerah (BD) adalah tidak signifikan, hal ini dibuktikan dari nilai *path* koefisien sebesar 0.099 dengan nilai p-Value sebesar 0.092 yang berarti p-Value > 0,05 dan standar error sebesar 0.073. Hasil ini menunjukkan bahwa tidak ada pengaruh antara Dana Alokasi Umum (DAU) terhadap Tingkat Kemiskinan melalui Belanja Daerah. Dengan demikian, pengaruh X2 terhadap Y melalui Z dalam penelitian ini hipotesis kedua yang menyatakan bahwa "Dana Alokasi Umum (DAU) berpengaruh terhadap Tingkat Kemiskinan melalui Belanja Daerah" ditolak, berarti tidak terdapat pengaruh yang signifikan secara parsial antara variabel independen terhadap variabel dependen melalui variabel mediasi atau secara parsial Dana Alokasi Umum (DAU) tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap Tingkat Kemiskinan melalui Belanja Daerah.

Tidak berpengaruhnya Dana Alokasi Umum (DAU) terhadap penurunan Tingkat Kemiskinan secara tidak langsung hal ini karena Dana Alokasi Umum (DAU) merupakan jenis transfer dana antar tingkat pemerintahan yang tidak terikat dengan program pengeluaran tertentu. Dana alokasi umum ini dimaksudkan untuk menggantikan transfer berupa subsidi daerah otonom dan inpres. Adapun tujuan dari transfer ini adalah untuk menutup kesenjangan fiskal (*fiscal gap*) dan pemerataan kemampuan fiskal antar daerah. Dana Alokasi Umum (DAU) oleh daerah lebih banyak digunakan untuk Operasional Daerah melalui Belanja Daerah yang tidak bersifat produktif sehingga tidak memberikan efek langsung terhadap kesejahteraan masyarakat.

Sebagai salah satu komponen pembiayaan daerah, besarnya Dana Alokasi Umum (DAU) yang diterima oleh 12 daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Riau selama 5 tahun terakhir mengalami fluktuasi yang cukup signifikan dengan kecenderungan yang meningkat. Hal ini memberikan gambaran bahwa pemerintah daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Riau sangat tergantung dari pusat dalam membiayai operasional daerahnya. Ini sejalan dengan pendapat Adi (2012), bahwa proporsi DAU terhadap penerimaan daerah rata-rata masih yang tertinggi dibanding dengan penerimaan daerah yang lain termasuk dari PAD yang digunakan untuk Belanja Daerah, namun belanja daerah tersebut lebih banyak digunakan untuk operasional daerah dan bukan untuk Belanja Modal yang dapat memberikan efek pada peningkatan kesejahteraan rakyat.

Tujuan Dana Alokasi Umum (DAU) adalah untuk mengatasi ketimpangan fiskal keuangan antara pemerintah pusat dan ketimpangan horizontal antar pemerintah daerah karena ketidakmerataan sumber daya yang ada pada masing-masing daerah. Dana Alokasi Umum (DAU) adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan

keuangan antar daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. DAU berperan dalam pemerataan horizontal (*horizontal equalization*), yaitu dengan menutup celah fiskal (*fiscal gap*) yang berada diantara kebutuhan fiskal dan potensi ekonomi yang dimiliki daerah. DAU diberikan pemerintah pusat untuk membiayai kekurangan dari pemerintah daerah dalam memanfaatkan PAD. Dana Alokasi Umum (DAU) pengalokasiannya menekankan aspek pemerataan dan keadilan yang selaras dengan penyelenggaraan urusan pemerintahan. Adanya perbedaan kebijakan yang berbeda antar daerah dalam penggunaan Dana Alokasi Umum (DAU) terutama pemanfaatan Dana Alokasi Umum (DAU) lebih banyak dialokasikan untuk membiayai operasional daerah yang tidak secara langsung memiliki kaitan dengan pembangunan infrastruktur daerah yang dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi sehingga tidak dapat menurunkan tingkat kemiskinan dan ini berarti adanya Dana Alokasi Umum (DAU) yang besar yang diterima oleh 12 Kabupaten/Kota di Provinsi Riau dan hampir setiap tahunnya mengalami peningkatan, namun penggunaannya lebih besar dialokasikan untuk belanja operasional pegawai. Hal tersebut menyebabkan DAU tidak berdampak terhadap tingkat kemiskinan.

Hasil ini didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh Andyka (2015), yang menyimpulkan bahwa secara parsial Dana Alokasi Umum (DAU) tidak pengaruh signifikan terhadap kemiskinan.

Pengaruh Dana Bagi Hasil (DBH) terhadap Tingkat Kemiskinan melalui Belanja Daerah

Berdasarkan tabel 1 di atas, diketahui bahwa pengaruh dana bagi hasil (DBH) terhadap Tingkat Kemiskinan (TK) melalui Belanja Daerah (BD) adalah signifikan, hal ini dibuktikan dari nilai *path* koefisien sebesar 0.658 dengan nilai p-Value sebesar <0.001 yang berarti p-Value $< 0,05$ dan standar error sebesar 0.089. Hasil ini menunjukkan bahwa ada pengaruh antara Dana Bagi Hasil terhadap Tingkat Kemiskinan melalui Belanja Daerah. Dengan demikian, pengaruh X3 terhadap Y melalui Z dalam penelitian ini hipotesis ketiga yang menyatakan bahwa “Dana Bagi Hasil (DBH) berpengaruh terhadap tingkat kemiskinan melalui belanja daerah” diterima, berarti terdapat pengaruh yang signifikan secara parsial antara variabel independen terhadap variabel dependen melalui variabel mediasi atau secara parsial dana bagi hasil memiliki pengaruh yang signifikan terhadap tingkat kemiskinan melalui belanja daerah.

Berpengaruhnya dana bagi hasil (DBH) terhadap penurunan jumlah Tingkat Kemiskinan secara tidak langsung hal ini karena dana bagi hasil (DBH) merupakan sumber pendapatan daerah yang cukup potensial dan merupakan salah satu modal dasar pemerintah daerah dalam mendapatkan dana pembangunan dan memenuhi belanja daerah. Hal ini dimaksudkan untuk mengatasi ketidakseimbangan vertikal antar tingkat pemerintah melalui dana bagi hasil (DBH) dan menyamakan kemampuan fiskal pemerintah daerah guna mendorong Belanja Daerah untuk kegiatan-kegiatan prioritas pembangunan, mendorong pencapaian pelayanan dan standar minimum, serta merangsang mobilisasi pendapatan (Carol, 2003 dalam Yolanda, 2014). Adanya Dana Bagi Hasil (DBH) sebagai salah satu sumber dana pembangunan berimplikasi pada meningkatnya sarana dan prasarana melalui peningkatan investasi infrastruktur serta tingkat pelayanan publik yang juga meningkat yang pada akhirnya akan meningkatkan taraf hidup masyarakat sehingga dapat menurunkan tingkat kemiskinan.

Dana Bagi Hasil (DBH) merupakan sumber pendapatan daerah selain yang berasal dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK). Besaran Dana Bagi Hasil (DBH) yang dialokasikan pada anggaran Belanja Daerah yang efektif dapat memacu pertumbuhan ekonomi melalui kebijakan fiskal yang selanjutnya akan menciptakan pembangunan ekonomi yang lebih tinggi pula. Diharapkan dengan pengalokasian Dana Bagi Hasil (DBH) akan mendorong pertumbuhan ekonomi di setiap daerah. Pertumbuhan ekonomi akan berdampak pada distribusi pendapatan yang berefek pada pengentasan kemiskinan.

Hasil ini didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh Andyka (2015) dan Sumedi Andono Mulyo dari Bappenas (2015), yang menyimpulkan bahwa dana bagi hasil (DBH) tidak langsung berkaitan dengan penurunan kemiskinan.

Pengaruh Jumlah Penduduk terhadap Tingkat Kemiskinan melalui Belanja Daerah

Berdasarkan tabel 2 di atas, diketahui bahwa pengaruh jumlah penduduk terhadap tingkat kemiskinan (TK) melalui belanja daerah (BD) adalah negatif tidak signifikan, hal ini dibuktikan dari nilai *path* koefisien sebesar -0.154 dengan nilai p-Value sebesar 0.197 yang berarti p-Value > 0,05 dan standar error sebesar 0.719. Hasil ini menunjukkan bahwa tidak ada pengaruh antara jumlah penduduk terhadap tingkat kemiskinan melalui belanja daerah. Dengan demikian, pengaruh X4 terhadap Y melalui Z dalam penelitian ini hipotesis keempat yang menyatakan bahwa “jumlah penduduk berpengaruh terhadap tingkat kemiskinan melalui belanja daerah” ditolak, berarti tidak terdapat pengaruh yang signifikan secara parsial antara variabel independen terhadap variabel dependen melalui variabel mediasi atau secara parsial jumlah penduduk tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap tingkat kemiskinan melalui belanja daerah.

Jumlah penduduk yang besar bagi pemerintah walaupun oleh para perencana pembangunan dipandang sebagai *asset* atau modal dasar pembangunan tetapi sekaligus juga sebagai beban pembangunan. sebagai *asset* apabila dapat meningkatkan kualitas maupun keahlian atau ketrampilannya sehingga akan meningkatkan produksi nasional. jumlah penduduk yang besar akan menjadi beban jika struktur belanja daerah yang dialokasikan untuk belanja langsung yang bersifat produktif juga rendah, serta persebaran dan mutunya sedemikian rupa hanya menuntut pelayanan sosial dan tingkat produksinya rendah sehingga menjadi tanggungan penduduk yang bekerja secara efektif (Mardiasmo, 2007).

Jumlah penduduk dalam pembangunan ekonomi suatu daerah merupakan permasalahan mendasar. Karena pertumbuhan penduduk yang tidak terkendali dapat mengakibatkan tidak tercapainya tujuan pembangunan ekonomi yaitu kesejahteraan rakyat serta menekan angka kemiskinan. Di kalangan para pakar pembangunan telah ada konsensus bahwa laju pertumbuhan penduduk yang tinggi tidak hanya berdampak buruk terhadap supply bahan pangan, namun juga semakin membuat kendala bagi pengembangan tabungan, cadangan devisa, dan sumberdaya manusia (Kuncoro, 2013). Sedangkan menurut Todaro (2000) dalam Mardiasmo (2007), bahwa besarnya jumlah penduduk berpengaruh positif terhadap kemiskinan. Hal itu dibuktikan dalam perhitungan indeks *Foster Greer Thorbecke* (FGT), yang mana apabila jumlah penduduk bertambah maka kemiskinan juga akan semakin meningkat.

Dari halis penelitian Irdha, Vecky dan Daisy (2012), pengeluaran belanja daerah dilihat dari perkembangan jumlah penduduk di suatu daerah, apabila perkembangan jumlah penduduk semakin besar akan memerlukan anggaran yang semakin besar pula. Meningkatnya jumlah penduduk menuntut konsekuensi logis

akan adanya peningkatan sarana dan prasarana umum, baik dari aspek kuantitas maupun kualitas. Perkembangan jumlah penduduk yang semakin besar akan memerlukan anggaran yang semakin besar, supaya kualitas pertumbuhan ekonomi lebih baik.

Hasil penelitian ini juga didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh Whisnu (2011), yang menyimpulkan bahwa Jumlah Penduduk berpengaruh positif signifikan terhadap tingkat kemiskinan.

Pengaruh Belanja Daerah terhadap Tingkat Kemiskinan

Berdasarkan tabel 2 diatas, diketahui bahwa pengaruh Belanja Daerah terhadap Tingkat Kemiskinan (TK) adalah negatif signifikan, hal ini dibuktikan dari nilai path koefisien sebesar -0.346 dengan nilai p-Value sebesar <0.001 yang berarti p-Value < 0,05 dan standar error sebesar 0.094. Hasil ini menunjukkan bahwa ada pengaruh antara Belanja Daerah terhadap Tingkat Kemiskinan. Dengan demikian, pengaruh Z terhadap Y dalam penelitian ini hipotesis kelima yang menyatakan bahwa “belanja daerah berpengaruh terhadap tingkat kemiskinan” diterima, berarti terdapat pengaruh yang signifikan secara parsial antara variabel mediasi terhadap variabel dependen atau secara parsial belanja daerah memiliki pengaruh yang negatif signifikan terhadap tingkat kemiskinan.

Berpengaruhnya belanja daerah terhadap penurunan jumlah tingkat kemiskinan secara langsung hal ini terkait dengan teori anggaran sektor publik. Dalam teori anggaran sektor publik dikemukakan bahwa anggaran sektor publik dibuat untuk membantu pemerintah dalam menentukan tingkat kebutuhan masyarakat seperti listrik, air bersih, kualitas kesehatan, pendidikan dan lain sebagainya agar terjamin secara layak dan tingkat kesejahteraan masyarakat akan semakin terjamin serta penggunaan dan pengalokasiannya lebih efektif. Dalam hal ini anggaran sektor publik tercermin dalam Belanja Daerah.

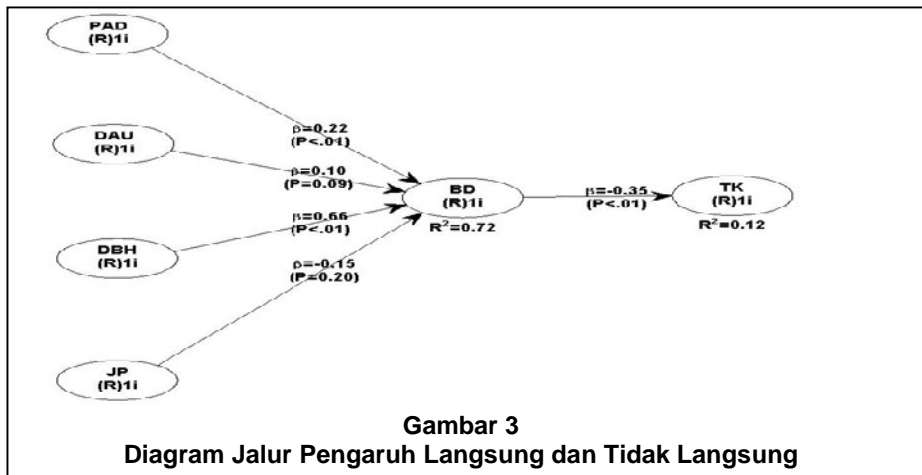
Belanja Daerah menurut PP No. 58 Tahun 2005 adalah semua pengeluaran dari rekening kas umum yang mengurangi ekuitas dana lancar, yang merupakan kewajiban Daerah dalam satu tahun anggaran yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh Daerah. Sesuai aturan APBD dan tujuan otonomi daerah, bahwa hakikat Anggaran daerah adalah merupakan alat untuk meningkatkan pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat, maka APBD harus benar-benar menggambarkan kerangka perangkaan ekonomis yang mencerminkan kebutuhan masyarakat untuk memecahkan masalahnya dan meningkatkan kesejahteraan (Mardiasmo, 2007).

Untuk meningkatkan produktivitas perekonomian di suatu daerah, peningkatan alokasi Belanja Daerah-nya terhadap Belanja Modal dalam bentuk aset tetap seperti infrastruktur dan peralatan sangat penting dan perlu ditingkatkan karena semakin tinggi Belanja Daerah yang dialokasikan terhadap Belanja Modal akan semakin tinggi pula produktivitas perekonomiannya, sehingga tujuan pelayanan kepada masyarakat dapat tercapai dan tingkat kesejahteraan masyarakat pun ikut naik. Dengan ikut naiknya taraf kesejahteraan masyarakat sehingga akan berimbas pada peningkatan pertumbuhan ekonomi daerah serta pemanfaatan belanja yang dilakukan pemerintah hendaknya dialokasikan untuk hal-hal produktif, misalnya untuk melakukan aktivitas pembangunan, pemanfaatan sumber daya yang optimal, dan kualitas SDM semakin ditingkatkan. Hal ini menyiratkan pentingnya mengalokasikan belanja pemerintah daerah untuk kepentingan publik. Peran pemerintah semakin dibutuhkan dalam mengatur jalannya sistem perekonomian, karena tidak sepenuhnya semua bidang perekonomian itu dapat ditangani oleh swasta (Kwik Kian Gie dalam Faisal Nur, 2015).

Seperti hasil penelitian yang dilakukan oleh Meilen, Amran dan Patrick (2014), menunjukkan bahwa Belanja Langsung memiliki pengaruh terhadap Kemiskinan di Kota Manado. Kemudian hasil lain dari penelitian Agustina (2013), menunjukkan bahwa Belanja publik berpengaruh positif terhadap Tingkat kemiskinan. Hasil penelitian ini juga didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh Sumedi (2015), yang menyimpulkan bahwa belanja daerah berkaitan langsung dan tidak langsung dengan angka penurunan kemiskinan.

Besarnya Pengaruh Langsung dan Tidak Langsung

Tahapan pengujian analisis jalur dimaksudkan untuk menguji besarnya kontribusi langsung dan tidak langsung pengaruh dari variabel pendapatan asli daerah (PAD), dana alokasi umum (DAU), dana bagi hasil (DBH) dan jumlah penduduk (JP) terhadap tingkat kemiskinan melalui variabel belanja daerah (BD). Hasil pengujian analisis jalur dapat digambarkan seperti pada Gambar 4.



Gambar 3
Diagram Jalur Pengaruh Langsung dan Tidak Langsung

Dari diagram analisis jalur seperti terlihat pada Gambar 3 dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Kontribusi langsung dan tidak langsung pengaruh variabel Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Tingkat Kemiskinan melalui Belanja Daerah (BD) adalah Besarnya kontribusi langsung pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Belanja Daerah (BD) adalah sebesar $0,218^2 \times 100\% = 4,75\%$. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa pengaruh langsung Pendapatan Asli Daerah (PAD) secara parsial kecil terhadap peningkatan Belanja Daerah, karena Belanja Daerah hanya meningkat sebesar 4,75%.
 - b. Adapun besarnya kontribusi tidak langsung pengaruh variabel Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Tingkat Kemiskinan melalui variabel Belanja Daerah (BD) adalah sebesar $(-0,075 - 0.346)^2 \times 100\% = 7,34\%$. Sehingga kontribusi total variabel Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Tingkat Kemiskinan melalui Belanja Daerah adalah sebesar 7,74%.
2. Kontribusi langsung dan tidak langsung pengaruh variabel Dana Alokasi Umum (DAU) terhadap Tingkat Kemiskinan melalui Belanja Daerah (BD) adalah:
 - a. Besarnya kontribusi langsung pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU) terhadap Belanja Daerah (BD) adalah sebesar $0,099^2 \times 100\% = 1,0\%$. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU)

- secara parsial kecil terhadap peningkatan Belanja Daerah, karena Belanja Daerah hanya meningkat sebesar 1,0%.
- b. Adapun besarnya kontribusi tidak langsung pengaruh variabel Dana Alokasi Umum (DAU) terhadap Tingkat Kemiskinan melalui variabel Belanja Daerah (BD) adalah sebesar $(-0,034 - 0.346)^2 \times 100\% = 9,7\%$. Sehingga kontribusi total variabel Dana Alokasi Umum (DAU) terhadap Tingkat Kemiskinan melalui Belanja Daerah adalah sebesar 9,7%.
3. Kontribusi langsung dan tidak langsung pengaruh variabel Dana Bagi Hasil (DBH) terhadap Tingkat Kemiskinan melalui Belanja Daerah (BD) adalah:
 - a. Besarnya kontribusi langsung pengaruh Dana Bagi Hasil (DBH) terhadap Belanja Daerah (BD) adalah sebesar $0,658^2 \times 100\% = 43,3\%$. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa pengaruh Dana Bagi Hasil (DBH) secara parsial cukup besar terhadap peningkatan Belanja Daerah, karena Belanja Daerah akan meningkat sebesar 43,3%.
 - b. Adapun besarnya kontribusi tidak langsung pengaruh variabel Dana Bagi Hasil (DBH) terhadap Tingkat Kemiskinan melalui Belanja Daerah (BD) adalah sebesar $(-0,288 - 0.346)^2 \times 100\% = 0,34\%$. Sehingga kontribusi total variabel Dana Bagi Hasil (DBH) terhadap Tingkat Kemiskinan melalui Belanja Daerah adalah sebesar 0,34%.
 4. Kontribusi langsung dan tidak langsung pengaruh variabel Jumlah Penduduk terhadap Tingkat Kemiskinan melalui Belanja Daerah (BD) adalah:
 - a. Besarnya kontribusi langsung pengaruh Jumlah Penduduk terhadap Belanja Daerah (BD) adalah sebesar $-0,154^2 \times 100\% = 2,37\%$. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa pengaruh Jumlah Penduduk secara parsial kecil terhadap peningkatan Belanja Daerah, karena Belanja Daerah hanya meningkat sebesar 2,37%.
 - b. Adapun besarnya kontribusi tidak langsung pengaruh variabel Jumlah Penduduk terhadap Tingkat Kemiskinan melalui Belanja Daerah (BD) adalah sebesar $(0,053 - 0.346)^2 \times 100\% = 15,9\%$. Sehingga kontribusi total variabel Jumlah Penduduk terhadap Tingkat Kemiskinan melalui Belanja Daerah adalah sebesar 15,9%.
 5. Kontribusi langsung pengaruh variabel Belanja Daerah (BD) terhadap Tingkat Kemiskinan adalah:
Besarnya kontribusi langsung pengaruh Belanja Daerah (BD) terhadap Tingkat Kemiskinan adalah sebesar $-0,346^2 \times 100\% = 12,0\%$. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa pengaruh Belanja Daerah (BD) secara parsial cukup besar terhadap upaya mempengaruhi penurunan Tingkat Kemiskinan, yaitu sebesar -12,0%.

Penjelasan sebagaimana yang telah diuraikan tersebut dapat dirangkum kedalam bentuk tabel sebagai berikut.

Tabel 3
Rangkuman Besar Kontibusi Langsung dan Tidak Langsung PAD, DAU, DBH, Jumlah Penduduk dan Belanja Daerah Terhadap Tingkat Kemiskinan

Pengaruh Variabel	Pengaruh terhadap Tingkat Kemiskinan		Pengaruh Total
	Langsung	Tidak Langsung	
Pendapatan Asli Daerah (PAD)		-0.075	0.734
Dana Alokasi Umum (DAU)		-0.034	0.097
Dana Bagi Hasil (DBH)		-0.228	0.034

Pengaruh Variabel	Pengaruh terhadap Tingkat Kemiskinan		Pengaruh Total
	Langsung	Tidak Langsung	
Jumlah Penduduk (JP)		0.053	0.159
Belanja Daerah (BD)	-0.346		0.120

Sumber: Data Olahan Penelitian, 2017

Dari tabel 3 dapat disimpulkan bahwa variabel yang memiliki pengaruh langsung maupun tidak langsung yang paling besar terhadap Tingkat Kemiskinan adalah variabel Jumlah Penduduk (JP) dengan pengaruh total sebesar 0,159 atau sebesar 15,9%. Sedangkan pengaruh yang paling kecil terhadap Tingkat Kemiskinan adalah variabel Dana Alokasi Umum (DAU) dengan pengaruh total sebesar 0,034 atau 3,4%.

Hasil tersebut sekaligus memperlihatkan bahwa variabel Belanja Daerah (BD) sebagai variabel mediasi (*intervening*) cukup berperan penting dalam meningkatkan pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Jumlah Penduduk (JP) dalam menurunkan Tingkat Kemiskinan, namun kurang berperan dalam meningkatkan pengaruh dana alokasi umum (DAU) dan dana bagi hasil (DBH) terhadap menurunkan Tingkat Kemiskinan.

Dari hasil ini juga dapat disimpulkan bahwa peran belanja daerah (BD) lebih dominan dalam mempengaruhi Jumlah Penduduk (JP) terhadap menurunkan tingkat kemiskinan dibandingkan dengan pengaruh pendapatan asli daerah (PAD, dana alokasi umum (DAU), dan dana bagi hasil (DBH) terhadap menurunkan tingkat kemiskinan.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka, dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut:

1. Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui Belanja Daerah (BD) memiliki pengaruh yang signifikan terhadap penurunan jumlah Tingkat Kemiskinan.
2. Dana Alokasi Umum (DAU) melalui Belanja Daerah (BD) tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap penurunan jumlah Tingkat Kemiskinan.
3. Dana Bagi Hasil (DBH) melalui Belanja Daerah (BD) memiliki pengaruh yang signifikan terhadap penurunan jumlah Tingkat Kemiskinan.
4. Jumlah Penduduk (JP) melalui Belanja Daerah (BD) memiliki pengaruh yang signifikan terhadap penurunan jumlah Tingkat Kemiskinan.
5. Belanja Daerah (BD) memiliki pengaruh yang signifikan terhadap penurunan jumlah Tingkat Kemiskinan secara langsung.
6. Belanja Daerah (BD) sebagai variabel mediasi (*intervening*) cukup berperan penting dalam meningkatkan pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Jumlah Penduduk (JP) dalam menurunkan Tingkat Kemiskinan, namun kurang berperan dalam meningkatkan pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Bagi Hasil (DBH) terhadap menurunkan Tingkat Kemiskinan.

Belanja Daerah (BD) sebagai variabel mediasi (*intervening*) lebih dominan dalam mempengaruhi Jumlah Penduduk (JP) terhadap menurunkan Tingkat Kemiskinan dibandingkan dengan pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Bagi Hasil (DBH) terhadap menurunkan Tingkat Kemiskinan.

DAFTAR PUSTAKA

- Andri, Devita, Arman Delis dan Junaidi, 2014, "Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum dan Jumlah Penduduk terhadap Belanja Daerah Kabupaten / Kota di Provinsi Jambi". *Jurnal Perspektif Pembiayaan dan Pembangunan Daerah* Vol. 2 No. 2, Hal. 17-31.
- Andyka, 2015, Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Bagi Hasil dan Belanja Daerah Terhadap Kemiskinan di DKI Jakarta. *Tesis* (Tidak dipublikasikan). Universitas Diponegoro. Semarang.
- Badan Pusat Statistik, 2015, *Survei Sosial Ekonomi Nasional*, September.
- Badan Pusat Statistik, 2015, *Statistik Keuangan Pemerintah Daerah di Provinsi Riau*.
- Badan Pusat Statistik. *Sensus Penduduk*. BPS. SP, 2010, www.bps.go.id
- Brata, Aloysius, Gunadi, 2008, *Investasi Sektor Publik Lokal, Pembangunan Manusia, dan Kemiskinan*. Lembaga Penelitian – Universitas Atma Jaya, Yogyakarta.
- Faisal Nur, Henry, 2015, *Ekonomi Publik (Ekonomi Untuk Kesejahteraan Rakyat)*, Edisi 2, Indeks, Jakarta.
- Ghozali, Imam. 2009, *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program SPSS*, Edisi Ketiga, Penerbit Universitas Diponegoro. Semarang.
- Halim, Abdul, 2008, *Bunga Rampai Manajemen Keuangan Daerah*, UPP-AMP YKPN, Yogyakarta.
- Jolianis, 2016, Analisis Pengaruh PAD, DAU dan DAK Terhadap Kemiskinan Pada Kabupaten/Kota Di Provinsi Sumatera Barat Dengan Pertumbuhan Ekonomi Sebagai Variabel Intervening, *Journal of Economic and Economic Education*, Vol.4, No. 2, Hal. 34-57.
- Kuncoro, Mudrajad, 2013, *Otonomi dan Pembangunan Daerah, Reformasi, Perencanaan, Strategi dan Peluang*, Airlangga, Jakarta.
- , 2010, *Metode Riset Untuk Bisnis dan Ekonomi*, Erlangga, Jakarta.
- Mardiasmo, 2007, *Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah*, Penerbit ANDI, Yogyakarta.
- Meilen, Gleri, Paseki, Amran. Naukoko, Patrick, Wauran, 2014, Pengaruh Dana Alokasi Umum dan Belanja Langsung Terhadap Pertumbuhan Ekonomi dan Dampaknya Terhadap Kemiskinan Di Kota Manado Tahun 2004-2012. *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi* Vol. 14, No. 3, Hal 19-37.
- McCulloch dan Sirait, 2009, *Fiscal rules, fiscal institutions, and fiscal performance. The Economic and Social review*. Vol.3. p.263-284.
- Peraturan Daerah Riau No. 10 Tahun 2004 tentang Pengelolaan Dana Alokasi Umum.

- Republik Indonesia. Undang-Undang No 28 Tahun 2009, Tentang Pajak dan Retribusi Daerah.
- Republik Indonesia. Undang-Undang No 12 Tahun 2008, Tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang No 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah.
- Simanullang, S. P., 2013, *Ekonomi Publik: Desentralisasi Fiskal dan Pembangunan Daerah*, BPFE, Unibraw, Malang.
- Suharto, 2009, Analisis Peran Sektor Ekonomi Terhadap Penyerapan Tenaga Kerja (Studi Pada Kabupaten/Kota di Wilayah Jawa Timur). *Jurnal*. Universitas Brawjaya Malang. (http://www.policy.hu/suharto/modul_a/makindo_13.html)
- Sumedi Andono Mulyo, 2015, Pengaruh DBH dan Belanja Daerah terhadap penurunan kemiskinan. *Forum Focus Group Discussion (FGD)* Bappenas, (dok. PWYP Indonesia), Jakarta.
- Todaro M. P and S. C. Smith, 2008, *Pembangunan Ekonomi*. Jilid 1. Edisi 9. Alih Bahasa. Penerbit Erlangga. Jakarta.
- Tri Hartitik, 2014, Pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus(DAK), Pendapatan Asli Daerah (PAD), dan Pertumbuhan Ekonomi terhadap Belanja Pemerintah Daerah di Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah tahun 2009-2011 *Jurnal Bisnis dan Ekonomi (JBE)*. Vol. 2, No. 2, Hal. 13-41.
- Wahyuni dan Priyo, 2009, Analisis Pertumbuhan Dan Kontribusi Dana Bagi Hasil Terhadap Pendapatan Daerah (Studi Pada Kabupaten/Kota Se Jawa-Bali), *National Conference UKWMS*, Hal. 33-49, Oktober. Surabaya.
- Wahyudi, 2015, Pengaruh Alokasi Belanja Daerah untuk Urusan Pendidikan, Kesehatan, dan Pekerjaan Umum terhadap Penanggulangan Kemiskinan (Studi Kasus Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah tahun 2007-2009). *Tesis* (Tidak dipublikasikan), Universitas Indonesia.
- Yolanda, 2014, Pengaruh Dana Alokasi Umum dan Pendapatan Asli Daerah Terhadap Belanja Pemda: Studi Kasus Kabupaten dan Kota di Jawa dan Bali. *Jurnal Ekonomi STEI* . Vol. 1, No. 2, Hal. 37-51